

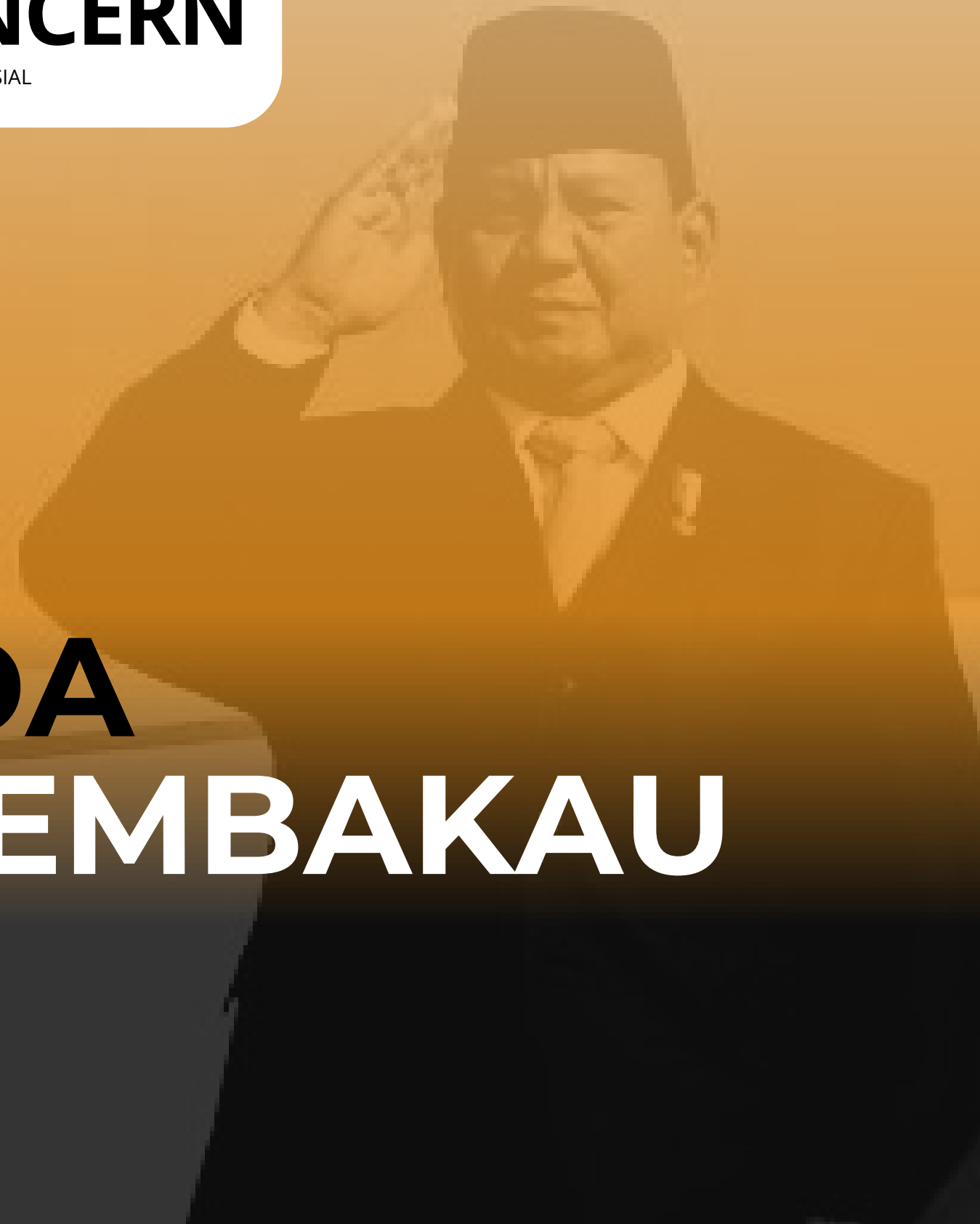
April 2025

LA



SPECIAL CONCERN

MEDIA BERITA DAN MEDIA SOSIAL



POTENSI PHK PADA INDUSTRI HASIL TEMBAKAU

This report is the property of the Great Institute and may not be published or distributed without prior written permission.

April 2025

LA

LATAR BELAKANG



Pada waktu belakangan ini, sering terjadi penutupan pabrik dan PHK massal, seperti pada PT Sritex, PT Yamaha Musik, PT Sanken Indonesia, dengan total pekerja yang di PHK sebanyak 14 ribuan pekerja. Penutupan pabrik yang mengakibatkan PHK massal akan menimbulkan banyak hal seperti penurunan penerimaan negara, peningkatan dana perlindungan sosial, turunnya produktivitas nasional dan bila berkepanjangan akan menimbulkan kerawanan sosial.

Potensi PHK ini kemungkinan besar akan ada lagi dengan adanya rencana Pemerintah menerbitkan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Pemenkes) sebagai turunan dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No 28 tahun 2024 tentang Kesehatan. Rancangan Permenkes tersebut akan menerapkan kemasan rokok polos tanpa identitas merek. Penyeragaman pada produk tembakau yang dihasilkan dikhawatirkan mengakibatkan menurunnya produksi. Menurunnya produksi akan membuat industri rokok melakukan efisiensi, termasuk efisiensi tenaga kerja. Sekitar 2,3 juta pekerja di sektor ini dan turunannya, yang mencakup 1,6% dari total tenaga kerja Indonesia, berisiko terdampak oleh kebijakan tersebut.

Selain itu, dari sisi penerimaan negara, data Kementerian Perindustrian menyatakan, kontribusi industri tembakau mencapai 4,22% dari PDB. Pada tahun 2024, penerimaan cukai hasil tembakau mencapai Rp 216,9 triliun atau setara 72 persen dari total penerimaan kepabeanan dan cukai. Kebijakan ini juga diperkirakan akan menurunkan penerimaan perpajakan sebesar Rp160,6 triliun, setara dengan 7% dari total penerimaan perpajakan nasional.



DAMPAK

1. Berpotensi menimbulkan PHK dalam jangka panjang yang dapat menambah kerawanan sosial
2. Menurunnya produksi tembakau dan/atau hasil tembakau.
3. Menurunkan penerimaan negara dari pajak dan cukai sektor tembakau dan rokok

SARAN

1. Menunda pelaksanaan PP No 28 Tahun 2024 dan pengesahan Rancangan Permenkes turunannya
2. Meninjau ulang peraturan PP 28/2024 dan menyesuaikan pelaksanaannya dengan kebutuhan pemulihan ekonominasional selama 5 tahun ke depan